

DAFTAR PUSTAKA

- Affan, Heyder. “Polemik Pilkada Calon tunggal Tunggal Di Tasikmalaya”, *bbc.com*, diakses pada 30 Maret 2017, http://www.bbc.com./indonesia/berita_indonesia2015/12/151204_indonesia_pilkada_calontunggal.
- Agustina, Widiarsi. “Mahar Politik Sering Menjadi Isu Pada Pelaksanaan Pilkada”. *tempo.co*. diakses pada 19 Februari 2018. <http://pilkada.tempo.co/mahar-politik-sering-menjadi-isu-pada-pelaksanaan-pilkada>.
- Agustino, Leo. *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Edisi revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Predana Media Grup, 2007.
- Djuhana. *Kepemimpinan Kiai Dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Endraswara, Suwardi. *Metodologi Penelitian Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Firmanzah. *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Fuad, Noeh. Munawar. *Kyai Di Panggung Pemilu*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Gabriel Almond, Sidney Verba. *Budaya Politik Tingkah Laku di Lima Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Hamidi, Jazim. *Rethinking Penyelenggara Pilkada Ynag Demokratis dan Partisipatif Dalam Konstitusionalisme Demokrasi (sebuah diskursus tentang pemilu, otonomi*

daerah dan mahkamah konstitusi sebagai kado untuk “sang penggembala” Prof. A Mukhtie Fadjar). Malang: In Tans Publising, 2010.

Imam Mudofar. “THF Mulai Sosialisasikan Tidak Setuju Untuk Pilkada Kab. Tasikmalaya”. *Kabarpriangan.co.id*. diakses pada 24 april 2017. <https://kabarpriangan.co.id/tfh-mulai-sosialisasikan-tidak-setuju-untuk-pilkada-kab-tasikmalaya/>.

J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2004.

Lutfi, Mustafa. *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2010.

Marieska. “Pro Kontra Calon Tunggal dalam pilkada Serentak”. *Kompasnia.com*. diakses pada 19 Juni 2016. <http://www.kompasnia.com/meyindri90/pro-kontra-calontunggal-dalam-pilkada>.

Matthew B Milies dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*.

Mudofar, Imam. “Tatang Farhanul Hakim Mensosialisasikan Tidak Setuju Untuk Pilkada Kab. Tasikmalaya”. *Kabarpriangan.co.id*. diakses pada tanggal 5 Desember 2017. <http://www.kabarpriangan.co.id/tatang-farhanul-hakim-mensosialisasikan-tidak-setuju-untuk-pilkada-kabupaten-tasikmalaya>.

Mulyono. “Partai Persatuan Pembangunan Yakin Warga Pilih Opsi Tidak Setuju di Pilkada Tasikmalaya”. *jurnalbandung.com*. diakses pada 20 November 2017. <https://www.jurnalbandung.com/partai-persatuan-pembangunan-yakin-warga-pilih-opsi-tidak-setuju-pilkada-tasikmalaya>.

Romli, Lili. *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Pasal 22E ayat (2) dan (5) dalam undang-undang 1945.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 1 ayat (22) UU nomor 8 tahun 2015.

Pasal 56 Undang-undang nomor 32 tahun 2004.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan kepala daerah.

Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah no 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2011.

Rizal, Asep. “Kelompok tidak setuju resmi dideklarasikan di Kabupaten Tasikmalaya”. *Radar Tasikmalaya*. 3 Desember 2015.

Saputra, Andi “Pilkada Tasik, Satu-satunya Calon Tunggal yang Digugat Pemantau Ke MK”, *news.detik.com*. diakses pada 30 Oktober 2017, <http://news.detik.com/berita/3113496/pilkada-tasik-satu-satunya-calon-tunggal-yang-digugat-pemantau-ke-mk>.

Sarundajang. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Jaya, 2001.

Sarwanto, Abi. “Perludem: Putusan MK Soal Calon Tunggal Sudah tepat”. *cnnindonesia.com*. diakses pada 24 april 2017. <http://www.cnnindonesia.com/politik/20151001235658-32-82261/perludem-putusan-mk-soal-calon-tunggal-sudah-tepat/>.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Alfabeta, 2007.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 1992.

Susan, Novri. *Pengantar Sosiologi Konflik*. (Jakarta: Prenada Media Grup (Kencana), 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

UU No. 1 Tahun 2015 diganti dengan UU No.8 Tahun 2015.

- Virdhani, Marieska Harya. "Pro Kontra Calon Tunggal Dalam Pilkada Serentak". *Kompasnia.com*. diakses pada tanggal 19 Juni 2016. <http://www.kompasiana.com/meryindri90/pro-kontra-calon-tunggal-dalam-pilkada-serentak>.
- Yin, Robert K. *Studi Kasus, Desain dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

